

**Implementasi *Good Governance* dan Pengukuran Kinerja Terhadap
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Mojokerto)**

Dyah Ratnawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip dan fungsi yang mempengaruhi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *good governance* dan pengukuran kinerja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari penyebaran kuisioner pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan *website* dinas terkait. Data yang diambil melalui *sampling jenuh* berdasarkan 34 responden. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda dengan tingkat signifikan 5%

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa variabel *good governance* berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan variabel pengukuran kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci : *Good Governance*, Tata Kelola Pemerintah, Pengukuran Kinerja, dan Akuntabilitas kinerja instansi.

Abstract

This study aims to determine the principles and functions that affect the accountability report performance of government agencies. The variables used in this research are good governance and performance measurement variables.

The data used in this study is the primary data taken from the distribution of questionnaires to the investment department and one-stop integrated service and related office website.

Data taken through saturation sampling based on 34 respondents. The hypothesis in this study was tested by using multiple linear regression with a significant level of 5%. From the results of research conducted found that the variable good governance significantly influence the performance accountability report of government agencies, while performance measurement variables have no significant effect on the accountability report performance of government agencies.

Keywords: Good Governance, Govt. Governance, Performance Measurement, and Institution performance accountant.

Pendahuluan

Dalam instansi pemerintah, laporan kinerja menjadi salah satu hal yang mempunyai tolak ukur dalam pelaporan kegiatan berhasil tidaknya suatu tujuan, misi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja selama waktu yang ditentukan. Laporan kinerja instansi pemerintah menyajikan informasi berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. (Sjahrudin Rasul, 2003) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas atau dalam konteks suatu organisasi. Bersamaan dengan itu sistem kinerja sebuah instansi menuju ke arah yang lebih baik, berkembang pula pemikiran tentang *good governance* yang merupakan tatanan kelola pemerintahan yang baik.

Good Governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan yang disebut penempatan sentral dalam pembangunan di pemerintahan. Dalam *good governance* tidak lagi persoalan pemerintah tetapi juga citizen, masyarakat terutama sektor usaha yang berperan dalam *good governance*. Dengan demikian perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar menjadi, Bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung di dunia usaha. Pelaporan LAKIP akan menunjukkan sebuah jawaban akan terciptanya sebuah *good governance* dimana hasil sebuah keberhasilan atau kegagalan ditentukan oleh akuntabilitas yang dikerjakan sehingga kinerja suatu instansi itu harus memutuskan apa yang akan di informasikan dari laporan kerjanya dan menjadi bahan untuk merubah ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintah selanjutnya. Suatu pertanggung jawaban atas kinerja memerlukan pengukuran kinerja untuk menjadikan efektifitas laporan.

Pengukuran kinerja penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya. berdasarkan sasaran dan standar juga kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001 : dalam Budiarti, 2007). Pencatatan dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa jasa maupun proses, namun sering dilakukan pengukuran secara tidak tepat. Ketidaktepatan ini disebabkan beberapa faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktepatan pengukuran kinerja adalah ketidakjelasan makna kinerja yang diimplementasikan, ketidakpahaman pegawai mengenai kinerja yang diharapkan, ketidakakuratan instrumen pengukuran kinerja, dan ketidakpedulian pimpinan organisasi dalam pengelolaan kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah *good governance*, dan pengukuran kinerja berpengaruh terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? Dengan tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *good governance* dan pengukuran kinerja terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *good governance* secara parsial signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengukuran

kinerja secara parsial tidak signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi instansi pemerintahan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam kegiatan pelaksanaannya dan meningkatkan semangat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Bagi masyarakat juga sektor usaha untuk lebih mengenal negaranya dan menjadi warga yang baik menaati peraturan yang telah ada dan ditetapkan agar semua paradigma pembangunan menjadi terlaksana dan lancar. Bagi peneliti selanjutnya dimohon untuk mengembangkan lagi dalam hal teori, dan identitas objek penelitian secara lengkap agar menciptakan penelitian dengan pembaruan yang baik.

Artikel ini ditulis dengan urutan sebagai berikut; bagian selanjutnya membahas tentang kajian teori dan pengembangan hipotesis, diikuti dengan pembahasan tentang metode penelitian mengenai penentuan sampel, pengumpulan data, dan metode pembuktian hipotesis. analisis dan pembahasan hasil penelitian ditulis pada bagian berikutnya. Bagian akhir, membahas kesimpulan, dan keterbatasan penelitian.

Kajian Literatur

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. LAKIP yang berisikan laporan pertanggungjawaban sebagai perwujudan sebuah instansi mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan dan mengukur kinerja apakah semakin baik atau semakin buruk. Penanggungjawab laporan ini adalah pejabat secara fungsional bertanggungjawab mealakukan dukungan *admisitrative* di instansi masing-masing. Suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Srimindarti, 2006). Laporan kinerja mempunyai fungsi untuk menjadi media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi wujud tertulis pertanggungjawaban suatu instansi, dan media informasi tentang sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *good governance* termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan. Prinsip-prinsip LAKIP mengikuti pelaporan pada umumnya diantaranya; (1) Jujur, (2) Objektif, (3) Akurat, (4) Transparan.

Penyusunan LAKIP harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, pelaporan yang berakuntabel, dan produktifitas di lingkungan instansi pemerintahan.

Good Governance

Konsep *Good Governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*. Secara sederhana banyak pihak yang menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah hanyalah salah satu dari tiga faktor besar pembentuk konsep *governance*. dua faktor lain yaitu *private sector* atau disebut sektor swasta dan *civil society* atau masyarakat, Oleh karena itu memahami tata pemerintah

adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam suatu aturan main yang telah disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus menciptakan lingkungan ekonomi dan sektor swasta sangat berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian sedangkan masyarakat berperan untuk mengontrol aktivitas perekonomian tersebut. Potensi pendapatan yang diterima oleh pemerintah akan menjadi lebih bertambah yang pada akhirnya, tata kelola pemerintah akan berjalan lebih baik jika semua sektor saling berkesinambungan. (Soedarmayanti, 2004 : 4) pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip , profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur atau dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Banyaknya faktor kinerja akan mempengaruhi sebuah hasil nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung seberapa jauh karyawan mampu melaksanakan pekerjaannya dengan akurat atau tidak dengan kesalahan apapun. Proses pengukuran serta penilaian kinerja untuk kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi yang dihasilkan nantinya dari efektifitas kerja yang dilakukan sebelumnya, artinya dalam pengukuran kinerja memerlukan hal dasar sebagai jalannya suatu organisasi atau instansi agar menilai baik buruknya suatu pelayanan dan tidak menyimpang dari misi yang telah ditetapkan.

Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Peran pemerintah tidak lagi dominan, akan tetapi juga *citizen*, masyarakat dan terutama sektor swasta yang berperan dalam terwujudnya *good governance*. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar demi menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung. Oleh karena itu dalam suatu keputusan manajemen yang dibuat oleh kebijakan instansi harus terpenuhi dengan baik, dan juga pengetahuan akan sektor swasta maupun masyarakat yang wajib mengerti hal kebijakan yang telah dibuat. Sistem yang berjalan baik dalam pemerintahan akan mengurangi tingkat kecurangan atau perilaku yang menyimpang sehingga tata pemerintahan benar-benar terwujud bersih. Dalam penelitian ini berpendapat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik meliputi beberapa sektor yang telah disebutkan akan berpengaruh positif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H₁ : *Good governance* berpengaruh terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

Pengaruh Pengukuran Kinerja Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan proses penilaian kemajuan dan tolak ukur dari hasil kerja karyawan dengan sasaran beserta tujuan kerja yang menjadi misi dari instansi

pemerintahan. Dari pengukuran tersebut nanti akan muncul sebuah hasil pencapaian dimana berhasil tidaknya laporan pertanggungjawaban yang di informasikan kepada pihak yang membutuhkan. Pengukuran kinerja yang dibuat instansi harus terpenuhi dengan baik dan juga mengembangkan tingkat efektifitas kerja lebih bagus lagi. Sehingga informasi yang disebut layanan akan pemaparan nantinya adalah nilai eksternal dari masyarakat yang mengetahui seberapa besar pengaruhnya dan sebagai kemajuan yang membangun kinerja lebih unggul. Dalam laporan akuntabilitas yang mempertanggungjawabkan hasil kinerja pada publik akan menjadi bahan evaluasi dan melakukan perhitungan agr terciptanya laporan yang berakuntabel yang juga di transparasikan. Penelitian ini berpendapat bahwa pengukuran kinerja melihat baiknya kreatifitas pegawai yang juga termotivasi kerjanya akan berpengaruh positif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H₂ : Pengukuran kinerja berpengaruh terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

Metode Penelitian

Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Menurut sugiyono (2008:61) pengertian variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab atau timbulnya dependen. Variabel X dalam penelitian ini adalah :

Penerapan *good governance* (X₁)

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain

Pengukuran kinerja (X₂)

Merupakan untuk menghasilkan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan menggambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam lembaga atau organisasi

Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lainnya. Menurut Sugiyono (2008:61) pengertian variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah: **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan pertanggungjawaban hasil kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sebagai wujud keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dalam suatu instansi atau lembaga. Dan juga ditunjukkan dengan fungsi sebagai pemberitahuan wujud tertulis tentang sejauh mana pelaporan di informasikan.

Pengukuran variabel

Dalam penelitian ini pengukuran variabel bebas maupun variabel terikat menggunakan instrumen skala interval dengan teknik pengukuran likert. Skala likert adalah metode skala yang umum digunakan dalam kuisioner yang mengukur baik tanggapan positif maupun negatif terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan lima pilihan dengan pola sebagai berikut :

STS

TS

C

S

SS

1	2	3	4	5
Skala terendah			Skala tertinggi	

Dalam penelitian ini responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dengan skala penilaian 1 sampai 5.

Dengan skala terendah bernilai 1 dan skala tertinggi bernilai 5. Dengan pilihan :

1. STS : Sangat tidak setuju
2. TS : Tidak setuju
3. C : Cukup
4. S : Setuju
5. SS : Sangat setuju

Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi menurut Kuncoro (2009:118) adalah “Kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian”. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 34 pegawai di instansi tersebut dan yang ikut andil dalam membuat laporan keuangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sugiyono (2011:62) penelitian ini menggunakan sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dimana sebanyak 34 pegawai untuk dijadikan sebagai responden pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.

Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang memerlukan validitas dan reliabilitas data kemudian dilanjutkan dengan uji normalitas, asumsi klasik dan heteroskedastisitas pada variabel bebasnya. Hubungan secara linier antar dua variabel atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen (Priyatno, 2012:80). Uji persamaan regresi dilakukan untuk mengetahui signifikansi dua variabel bebas (X) atau lebih secara bersama-sama (simultan) dengan variabel terikat (Y). Uji ini digunakan untuk bukti kelayakan dua persamaan tersebut. Berdasarkan uji regresi linier berganda yang telah dilakukan dengan alat bantu komputer berupa SPSS 20.0 for windows, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = 19.237 + 0.647 X_1 - 0.169 X_2$$

Keterangan :

Y = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi good governance

β_2 = Koefisien regresi standar akuntansi pemerintah

X_1 = Good governance

X_2 = Pengukuran Kinerja

Dalam penelitian ini akan ada beberapa kriteria pengujian:

Uji validitas dan reliabilitas

Uji validitas item digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur objeknya. Item dikatakan valid jika ada korelasi dengan skor total". Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuisioner.

Uji Reliabilitas Suatu alat ukur disebut reliabel apabila responden konsisten dalam mengisi alat ukur atau pertanyaan yang diajukan. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Menurut Priyatno (2012 : 120) menyatakan "uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajegan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuisioner (maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapat pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali)". Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika r alpha positif dan $r >$ tabel selanjutnya untuk mengukur atau menguji apakah kuisioner yang dipakai untuk mengambil data penelitian dapat dipercaya atau reliabel digunakan uji reliabilitas dengan menggunakan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu analisis regresi, variable dependen, variable independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Dan model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal yang mendekati normal.

Priyatno (2012 : 36) menyatakan "untuk pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorofv Smirnov cukup melihat nilai signifikansi (sig). jika signifikansi kurang dari 0,05 maka kesimpulannya data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal".

Uji Hipotesis

Uji T digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh masing-masing variable pengaruh Penerapan X_1 (*Good governance*), dan X_2 (pengukuran kinerja) terhadap (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Prosedur uji t adalah sebagai berikut :

Hipotesis

Hipotesis statistiknya pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh variable X_1 secara parsial terhadap Y)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh variable X_1 secara parsial terhadap Y)

$H_0 : \beta_2 = 0$ (tidak ada pengaruh variable X_2 secara parsial terhadap Y)

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ (ada pengaruh variable X_2 secara parsial terhadap Y).

Dengan t hitung :

$$t_{hit} = \frac{b_1}{se(b_1)} \text{ (Anonim, 2001 : L-21)}$$

Keterangan :

b_1 = Koefisien regresi

Se = Standart

Kriteria Pengujian :

Jika tingkat signifikansi $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika tingkat signifikansi $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengujian kecocokan model

Dari hasil pengujian dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda, dari output spss diperoleh hasil persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = 19.237 + 0.647 X_1 - 0.169 X_2$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai konstanta sebesar 19.237 artinya good governance (X_1), pengukuran kinerja (X_2) dianggap konstan maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 19.237. Koefisien regresi variabel good governance (X_1) sebesar 0,647 artinya good governance mengalami kenaikan 64,7 %, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,647 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel pengukuran kinerja (X_2) sebesar -0,169 artinya standar akuntansi pemerintah mengalami kenaikan -16,9%, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) mengalami penurunan sebesar -0,169 dengan asumsi variabel independen lain nilainya berubah.

Analisa data penelitian

Tabel 4.6
Hasil Uji validitas variabel Good Governance (X_1)

Item	Nilai r hitung(Corrected Item – Total Correlation)	Ketentuan	Keterangan
X _{1.1}	0,789	$r \geq 03$	Valid
X _{1.2}	0,591		Valid
X _{1.3}	0,672		Valid
X _{1.4}	0,601		Valid
X _{1.5}	0,915		Valid
X _{1.6}	0,883		Valid
X _{1.7}	0,552		Valid
X _{1.8}	0,521		Valid

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat diketahui bahwa seluruh butir atau item pertanyaan kuisisioner dari variabel Good Governance (X_1) mempunyai nilai $r \geq 3$ dan sesuai dengan dasar analisis yang digunakan, hal ini berarti bahwa seluruh butir atau item pertanyaan kuisisioner tersebut seluruhnya valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Pengukuran Kinerja (X_2)

Item	Nilai r hitung(Corrected Item – Total Correlation)	Ketentuan	Keterangan
X _{2.1}	0,823	$r \geq 03$	Valid
X _{2.2}	0,693		Valid
X _{2.3}	0,559		Valid
X _{2.4}	0,446		Valid

X _{2.5}	0,572	Valid
X _{2.6}	0,792	Valid
X _{2.7}	0,761	Valid
X _{2.8}	0,793	Valid
X _{2.9}	0,595	Valid

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat diketahui bahwa seluruh butir atau item pertanyaan kuisisioner dari variabel Pengukuran Kinerja (X₂) mempunyai nilai $r \geq 3$ dan sesuai dengan dasar analisis yang digunakan, hal ini berarti bahwa seluruh butir atau item pertanyaan kuisisioner tersebut seluruhnya valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.8

Hasil Uji validitas variabel Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Y)

Item	Nilai r hitung(Corrected Item – Total Correlation)	Ketentuan	Keterangan
Y.1	0,659	$r \geq 03$	Valid
Y.2	0,631		Valid
Y.3	0,807		Valid
Y.4	0,786		Valid
Y.5	0,745		Valid
Y.6	0,852		Valid
Y.7	0,754		Valid
Y.8	0,915		Valid

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat diketahui bahwa seluruh butir atau item pertanyaan kuisisioner dari variabel Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) mempunyai nilai $r \geq 3$ dan sesuai dengan dasar analisis yang digunakan, hal ini berarti bahwa seluruh butir atau item pertanyaan kuisisioner tersebut seluruhnya valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam kuisisioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. (Umar, 2009 : 168-169). Pokok-pokok yang dapat disampaikan tentang uji reliabilitas ini menurut Noor (2011 : 165).

- a. Untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuisisioner. kuisisioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan.
- b. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaan, jika nilai $\alpha > 0,60$, disebut reliabel

Berdasarkan dari hasil uji reliabilitas dengan alat bantu SPSS. 20.0 for windows, untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada masing-masing variabel pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	NiaiCronbach's Alpha	Ketentuan	Keterangan
Good Governance	0,840	0,6	Reliable
Pengukuran Kinerja	0,831		Reliable
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,899		Reliable

Statistik variabel penelitian

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat. Pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistic t dapat dilihat pada table 4.15, jika nilai *probability* $< 0,05$, maka H_a diterima, sedangkan jika nilai *probability* $> 0,05$ maka H_a ditolak.

Tabel 4.15 UJI T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	Colinearity Statistic
		B	Std. Error	Beta				VIF
1	(Constant)	19.237	6.882		2.795	.009		
	X ¹	.647	.250	.617	2.586	.015	.413	2.422
	X ²	-.169	.298	-.136	-.569	.573	.413	2.422

Table 4.16 diatas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. Dari kedua variabel bebas tersebut yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai yang signifikan $p_{value} < 0,05$, ini terlihat dari variabel bebas good governance menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,015 lebih besar dari 0,05, sehingga diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Dengan demikian disimpulkan bahwa good governance berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah .

Pengujian standar akuntansi pemerintah menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,573 lebih besar dari 0,05, sehingga diputuskan untuk menerima H_0 dan menolak H_1 . Dengan demikian disimpulkan bahwa pengukuran kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah .Hal ini berarti peningkatan atau penurunan

pengukuran kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh good governance terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan pada hasil perhitungan dan pengolahan data, dapat diketahui bahwa tata kelola pemerintahan atau disebut good governance terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “ terdapat pengaruh penerapan good governance terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” teruji.

Sehingga dalam good governance peran pemerintah tidak lagi dominan, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor swasta atau usaha yang berperan dalam governance. pemerintah bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung untuk menjadikan tatanan kelola pemerintahan yang baik.

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hasil kinerja pertanggung jawaban yang dilaporkan dari suatu kegiatan yang dilakukan dimana pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dari amanat kepada masyarakat atau publik juga sektor swasta atau para usaha. Dengan penerapan good governance diharapkan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik yang berdasarkan tiga pilar domain good governance yakni Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.

Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance dituntut untuk dapat memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Laporan pertanggungjawaban harus menjadi informasi yang diberitahukan untuk menjadi penilaian publik dari hasil kegiatan pemerintahan dalam menjalankan fungsi instansinya.

Pengaruh Pengukuran Kinerja terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pada hasil perhitungan dan pengolahan data, pengujian standar akuntansi pemerintah menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,573 lebih besar dari 0,05, sehingga diputuskan untuk menerima H_0 dan menolak H_1 . Dengan demikian disimpulkan bahwa pengukuran kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti peningkatan atau penurunan pengukuran kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian kenaikan atau penurunan pengukuran kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal ini mungkin pengukuran kinerja dalam pelaporan untuk laporan pertanggungjawaban belum dibutuhkan, menurut penelitian ini disebabkan bahwa dalam pelaporan hasil pertanggungjawaban kinerja suatu instansi masih menganut Permenpan pasal 3 no 53 tahun 2014 disebutkan bahwa “pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampirannya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan menteri ini”. Dan pengukuran kinerja sebagai proses dimana pengukuran kinerja dibutuhkan seringkali di instansi maupun organisasi penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya, dan untuk meningkatkan kinerja secara umum, namun pada laporan akuntabilitas kinerja instansi ini hanya memaparkan hasil kinerja pertanggungjawaban dalam kegiatan usai dilakukan. oleh karena itu kemungkinan menurut penelitian ini pengukuran kinerja belum dibutuhkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian Secara parsial variabel pengukuran kinerja mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. Mojokerto.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan good governance dan pengukuran kinerja terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Responden dalam penelitian ini berjumlah 34 orang yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun kesimpulan yang dihasilkan sebagai berikut :

Model regresi yang dihasilkan cocok untuk menguji good governance dan pengukuran kinerja terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab mojokerto.

Secara parsial variabel good governance mempunyai signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. mojokerto.

Secara parsial variabel pengukuran kinerja mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiriyadi, Teguh. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. September 10, 2009 Arif Rizky Ramadhan. 2014. *Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Good Governance*. BPKD Kabupaten Banjar. 2017. *Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*
- Davis, Keith. (1987) *Teori Partisipasi*.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Elvira Zeyn. 2011. *Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. *Trikonomika*, Vol 10 No. 1, hal. 52-62
- Imawan, Riswandha. 2005. "Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance" dalam Syamsudin Haris (editor) et al. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Jamanson Sinaga. 2005. *Laporan Keuangan*
- Kusmayadi, Dedi. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Good Government Governance*. Gorontalo: Jurnal Ichsan, Vol.4 No.2
- Kuswanto, Goto. *Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia*
- Mardiasmo. 2006. *Good Governance*. Dalam Dedi Kusmayadi 2009. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2. No. 1
- Maryam, Neneng Siti. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* Vol. 4 No. 1
- Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dalam Hardjasoemantri 2003. *Prinsip-prinsip Transparansi*.
- Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh. (2008). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Prof. Bintoro Tjokroamidjojo, "Good Governance, (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)", *Jurnal Manajemen Pembangunan* No.30 Tahun IX, Mei 2000
- R Arief. 2014. *Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*.

- Saleh, Sirajudin H & Aslam Iqbal. 1995. *Accountability The Endless Propechy*. Asian and Pacific Development centre.
- Sastropoetro, S. 1995. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sjahrudin Rasul, 2003. *Definisi Akuntabilitas*
- Soedarmayanti, 2004. *Teori Tentang "Good Governance"*, hal. 4
- Menurut (Sastropoetro : 1995,11) Partisipasi
- Imawan (2005 : 45). *Dua Ciri Besar Besar Good Governance*
(stakeholder). LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
- Vicky Agustawati Lasoma. 2013. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Jurnal Universitas Negeri Gorontalo
- Abdul Halim (2012 : 35). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Muhammad Gade (2000 : 95). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Bastian Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Srimindarti. 2006. *Kinerja Instansi Pemerintah*
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Arsadi, 2011, *Kajian Penerapan Good Governance Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Skripsi Institut Pertanian Bogor Fakultas Ekonomi Dan Manajemen*.
- Sandy, Peggy, 2013, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*, Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat
- Kuncoro. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Priyatno. 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik SPSS*. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. www.dpj.k.depkeu.go.id
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. www.bpkp.go.id
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 112 Ayat 1 Tentang Sisitem Akuntansi Keuangan Daerah. www.keuda.kemedagri.go.id
- Deklarasi Tokyo. 1985. Mengenai "Petunjuk akuntabilitas publik".
<https://pusat-studi-kebijakan-publik.blogspot.com/>, di akses pada tanggal 19 Februari 2018
<http://www.wikiapbn.org/standar-akuntansi-pemerintahan/>, di akses pada tanggal 19 Februari 2018
<http://www.jawapos.com/radarmojokerto/>, di akses pada tanggal 05 januari 2018